

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar Rupiah terhadap *Dollar* AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun (Anggraini dan Nasution, 2013:105). Akibat krisis tersebut, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan serta melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau disebut dengan PHK secara besar-besaran. Akan tetapi, pelaku UMKM mampu bertahan hingga saat ini. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa UMKM memiliki struktur yang kuat sehingga mampu bertahan dalam krisis tersebut. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan untuk mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan memengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang (Suci, Yuli Rahmini 2017:51).

Akan tetapi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2015), terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pertama, permasalahan yang terkait dengan pencatatan keuangan. Kedua, masalah yang terkait dengan permodalan. Ketiga, masalah yang terkait dengan penguasaan teknologi, dan yang keempat adalah permasalahan yang terkait dengan pemasaran produk maupun jasa UMKM. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan

Nasution (2013) yang menyatakan bahwa hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha salah satunya yaitu kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya.

Laporan keuangan bagi UMKM dapat digunakan untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal bagi usaha kecil dari kreditor (Bank). Salah satunya pada tanggal 5 November tahun 2007 diterbitkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memberikan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Permenko No. 11 Tahun 2017). Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu menyusun laporan keuangan usahanya, dan sebagian besar pelaku UMKM hanya melakukan pencatatan terkait transaksi sehari-hari. Akibatnya, pelaku UMKM mendapat kesulitan dalam hal penambahan modal dari kreditor (Bank). Perlunya penyusunan laporan keuangan bagi UMKM sebenarnya bukan hanya untuk kemudahan memperoleh kredit dari kreditor, tetapi untuk mengetahui laba atau rugi yang sebenarnya, pengendalian aset, kewajiban dan modal serta perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya-biaya yang terjadi yang pada akhirnya digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan perusahaan (Mulyani, 2014:139).

Untuk itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 19 Mei 2009 yang berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 dengan penerapan dini diizinkan. SAK ETAP digunakan oleh entitas tanpa

akuntabilitas publik sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan UMKM yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 4 poin b yaitu, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Dalam perkembangannya, terdapat kebutuhan SAK yang lebih sederhana dari SAK ETAP bagi UMKM karena SAK ETAP dianggap masih terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan UMKM (DSAK IAI, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Setiady (2012) juga mengungkapkan bahwa, keseluruhan responden belum sepenuhnya mengetahui serta memahami standar akuntansi terkait pencatatan keuangan untuk UMKM yaitu SAK ETAP. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pengimplementasian SAK ETAP salah satunya akibat bahasa standar akuntansi yang susah di pahami. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Salmiah, dkk (2015), menyatakan bahwa penerapan akuntansi pada UMKM rata-rata belum sesuai dengan SAK ETAP. Akibat masih banyak penelitian yang menyatakan bahwa implementasi SAK ETAP pada UMKM masih kurang serta kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK ETAP, DSAK IAI pada tahun 2016 telah menerbitkan suatu pilar SAK baru yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Atas penerbitan SAK EMKM diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong agar pelaku UMKM dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM serta memudahkan proses peminjaman kredit.

Dari seluruh provinsi di Indonesia, Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang tradisi masyarakatnya terkenal dengan berdagang. Berdasarkan hasil

sensus ekonomi tahun 2016, provinsi Sumatera Barat memiliki 586.935 unit usaha mikro kecil dan menengah besar. Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki jumlah UMKM terbanyak dibandingkan daerah lainnya yaitu sebesar 92.077 unit usaha (<https://se2016.bps.go.id>). PT Semen Padang adalah salah satu perusahaan terbesar di Kota Padang dan memiliki mitra usaha yang dibina oleh PT Semen Padang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Satrio ketua bidang CSR PT Semen Padang menyebutkan bahwa terdapat 1.700 mitra usaha binaan PT Semen Padang yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di berbagai daerah salah satunya yaitu Kota Padang. Mitra usaha yang dibina oleh PT Semen Padang diberikan modal berupa pinjaman yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait atas pemahaman pelaku UMKM khususnya pada mitra usaha binaan PT Semen Padang terhadap SAK EMKM. Untuk itu penulis memberikan judul untuk penelitian ini yaitu **“Studi Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap SAK EMKM (Studi Empiris pada Mitra Usaha Binaan PT Semen Padang di Kota Padang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat diidentifikasi permasalahan yang akan diteliti oleh penelti adalah bagaimana tingkat pengetahuan pelaku UMKM binaan PT Semen Padang mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan pelaku UMKM binaan PT Semen Padang mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan ilmu pengetahuan baru serta dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi. Serta, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya mengenai implementasi SAK EMKM dalam proses penyajian laporan keuangan.

3. Bagi DSAK IAI

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan oleh DSAK IAI untuk menentukan apakah SAK EMKM sudah tepat digunakan oleh pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan.

4. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

